



Buletin Parlementaria

Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021

Komisi IV Soroti Pendangkalan Pelabuhan Perikanan Lampulo



7 Komisi IV Apresiasi
Ekspor Produk Flora
dan Fauna Asal Jatim



14 Komisi IX Dukung
Program Pemprov
Kepri Bangun
SDM Berkualitas



9 772614 339005



BULETIN

Komisi IV Soroti Pendangkalan Pelabuhan Perikanan Lampulo

Pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas dari hasil tangkapan nelayan, termasuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Provinsi Aceh. Namun pelabuhan itu kini menghadapi masalah pendangkalan kolam tambat labuh pelabuhan yang tidak maksimal, di mana saat ini hanya sekitar 1-4 meter. Sedangkan idealnya lebih dari 6 meter, guna mencegah terjadinya kandas kapal di atas 30 GT.

“Permasalahan pendangkalan ini menjadi perhatian Komisi IV, di mana pada tahun 2019 Komisi IV pernah juga datang ke sini, namun hingga saat ini belum ada kepastian solusinya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera Kuta Raja/ Lampulo, Aceh, Senin (15/2).

Turut hadir Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dan mitra kerja terkait.

“Saya hadir ke sini bersama tim ingin melihat faktor apa saja yang menyebabkan adanya pendangkalan, bisa dari hulu sungai, yakni turunnya sedimen pasir ataupun bebatuan sehingga menyebabkan terjadinya pendangkalan, kemudian faktor alam di mana terjadi pergeseran sedimen di bawah air laut akibat arus. Dari beberapa faktor tersebut diperlukan kajian dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk mengetahui sumbernya,” urai Dedi.

Politisi Partai Golkar itu menengarai adanya faktor lain pendangkalan kolam tambat labuh pelabuhan ini,



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (tiga dari kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera Kuta Raja/ Lampulo, Aceh. Foto: Runi/nvl

bisa terkait karena penggundulan hutan atau masalah lainnya. Dengan demikian jika nantinya sudah menemukan persoalan tersebut, Dedi mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pengerukan.

“Dalam hal ini Komisi IV akan memberikan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang ada, di mana kita bicara dari hulu dulu sebelum nantinya harus ada pengerukan. Ada beberapa usulan mengemuka terkait ini, dimana ada sejumlah alat yang berteknologi yang bisa digunakan untuk melakukan pengerukan, sehingga meminimalisir pemborosan anggaran,” tandas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid menjelaskan sudah sejak lama terjadi pendangkalan di Pantai Lampulo, karena tidak dilakukan pengerukan.

“Bahkan saya dan Komisi IV sudah dua kali hadir ke lokasi ini, masih belum ada solusi. Untuk itu, kita sudah sepakat, Komisi IV dengan Dirjen Perikanan Tangkap pada tahun ini sudah bisa sepakat untuk (penanganan)dianggarkan pada (anggaran) tambahan tahun ini,” yakin politisi Fraksi Partai Gerindra di sela-sela peninjauan.

“Di mana kita sudah sepakat dengan anggaran senilai Rp50 miliar, diharapkan dengan kesepakatan ini Dinas Perikanan yang ada di Aceh bisa melakukan *Detail Engineering Design* (DED) yang baik, agar anggaran yang kita dorong dalam tahun ini yakni (melalui) anggaran APBN-P bisa bermanfaat maksimal sesuai kebutuhan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada,” harap legislator dapil Aceh II itu. ■ rni/sf



Timwas Bencana DPR Serahkan Bantuan ke Kabupaten Sukabumi

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serius ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang kerap dilanda bencana.

Hal itu diungkapkan Gus AMI, sapaan akrabnya, saat bertemu Plh. Bupati Sukabumi, Zainul S dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/2). Menurutnya, bencana longsor berulang kali terjadi di Sukabumi, sementara yang lama belum tertangani akibat keterbatasan anggaran terutama hunian sementara maupun rumah untuk relokasi.

“Oleh karena itu, saya minta perhatian serius terutama kepada Menteri PUPR, yang kedua kepada teman-teman komisi, baik itu

Komisi V, Komisi IX, Banggar untuk memperhatikan secara khusus *emergency* ini, Terutama Huntera (Hunian Sementara) maupun hunian tetap sebagai sarana relokasi korban musibah itu,” kata Gus AMI.

Turut mendampingi, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah serta perwakilan BNPB. Dalam kesempatan tersebut Gus AMI menyerahkan sejumlah bantuan untuk korban bencana di Sukabumi berupa selimut, masker, alat swab antigen dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Ketua Umum PKB ini menegaskan, perhatian pemerintah untuk wilayah Sukabumi mutlak harus dilakukan. Bahkan banyak di antaranya memerlukan penanganan secara permanen. “Sukabumi harus mendapat perhatian karena terlampaui sering mendapat bencana yang harus ditangani secara permanen,” tandas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. ■ oji/sf



Ketua Timwas Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan bantuan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi. Foto: Oji/Man



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ertangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyawati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widaywati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friedrick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

Implementasi Reformasi Birokrasi di Kepri Dinilai Cukup Baik

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dari awal bulan Maret 2020 lalu, telah mengubah tatanan kehidupan di Indonesia tanpa terkecuali implementasi sistem kerja reformasi birokrasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai implementasi reformasi birokrasi di Kepulauan Riau (Kepri) sudah cukup baik. Hal ini diperkuat dengan adanya percepatan implementasi *e-government* di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian diungkapkan Doli saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Plh. Gubernur Kepri Ts Arief Fadillah, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang, Senin (15/2).

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, di tengah pandemi Covid-19, banyak penyesuaian yang dilakukan terkait reformasi birokrasi. Ditambah pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan perampingan struktur birokrasi. “Nah jadi dua isu ini harus kita pastikan, apakah bisa menjawab terhadap peningkatan kualitas aparat pemerintah kita, birokrat kita, yang sasaran utamanya adalah pelayanan publik yang maksimal,” jelas Doli.

Saat ini, lanjut Doli, Komisi II DPR RI diberi amanah untuk melakukan penyusunan terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ASN. Oleh karenanya masukan-masukan terhadap RUU ini menjadi penting. “Misalnya tadi disampaikan soal tenaga honorer yang sudah diusulkan sebanyak 1.044 orang, tapi yang baru diterima cuma puluhan.

Nah ini menjadi perhatian kami, untuk kami sampaikan ke mitra kerja kami, Menteri PAN-RB pada rapat kerja berikutnya,” imbuh politisi dapil Sumatera Utara III itu.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Plh. Gubernur Kepri Ts Arief Fadillah mengatakan implementasi reformasi birokrasi Pemprov Kepri telah melakukan pemetaan kesesuaian tugas pokok dan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu.

la melanjutkan, terdapat perangkat daerah yang belum dilakukan pemetaan dikarenakan masih banyaknya tugas fungsi administrasi yang belum terakomodir ke dalam jabatan fungsional. “Pemprov Kepri sudah menerapkan *e-government* dalam

penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di beberapa sektor misalnya SEMANJA, SIJEMPOL, SIAP, SILAT dan lain-lain,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Pemprov Kepri telah mempersiapkan ruangan *computer assisted test* (CAT). Untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021, pihaknya telah mengusulkan kebutuhan CPNS 2021 sebanyak 62 formasi CPNS kemudian diverifikasi menjadi 38 formasi.

“Pemprov Kepri mengajukan usulan kebutuhan sebanyak 1.044 formasi guru disesuaikan dengan jumlah kebutuhan guru Provinsi Kepri sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.964 orang,” tutup Arief. ■ tra/es

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Foto: Tiara/invl



Komisi II Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jatim



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jatim, Kepala BKD Jatim, Kepala Perwakilan ORI Jatim, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jatim, serta KPUD dan Bawaslu se-Jatim. Foto: Hanum/mv

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bisa dikatakan berjalan sukses. Tak ayal, Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020.

Hal ini ia ungkapkan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jatim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim, Kepala Perwakilan ORI Jatim, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu

Jatim, serta KPUD dan Bawaslu se-Jatim yang menyelenggarakan Pilkada 2020, di Surabaya, Senin (15/2).

“Jadi kami (Komisi II DPR RI) berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu serta jajaran Pemerintah Provinsi Jatim. Karena selama pertemuan tadi sudah menyampaikan secara transparan dan apa adanya terkait kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Pilkada 2020,” ucap Djarot.

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, penting memetakan sebuah persoalan-persoalan mendasar dalam pelaksanaan Pilkada. Sebab, hal

”

JADI KAMI (KOMISI II DPR RI) BERTERIMA KASIH KEPADA KPU DAN BAWASLU SERTA JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM. KARENA SELAMA PERTEMUAN TADI SUDAH MENYAMPAIKAN SECARA TRANSPARAN DAN APA ADANYA TERKAIT KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PADA SAAT PELAKSANAAN PILKADA 2020

itu dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur. Sehingga pada saat penyelenggaraan Pilkada ataupun Pemilu berikutnya, kendala-kendala tersebut dapat teratasi.

“Harapannya KPU, Bawaslu, beserta *stakeholder* terkait di Provinsi Jawa Timur ini dapat mempersiapkan dengan baik perihal desain penyusunan Pemilu maupun Pilkada selanjutnya dengan sederhana, mudah dilaksanakan, cepat, tepat, akurat dan tetap menghormati ataupun mendahulukan hak demokrasi setiap warga negaranya,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut. ■ hnm/sf

Komisi IV Tinjau Pasokan Beras di Gudang BULOG Sempidi Bali

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau pasokan beras selama situasi pandemi di Komplek Pergudangan GBB Sempidi, Badung, Bali. Tujuan kedatangan Komisi IV DPR RI ke Gudang BULOG tersebut adalah untuk mendapat gambaran mengenai ketersediaan pasokan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat Provinsi Bali, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pemerintah telah berperan aktif melalui Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan, terutama beras bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Ketua Komisi IV DPR RI Sudin di Bali, Senin (15/2). Turut mendampingi, Direktur Bisnis BULOG Febby Novita dan Pimpinan Wilayah BULOG Bali.

Guna meningkatkan kesejahteraan mereka, sambung Sudin, pemerintah telah berperan aktif untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. “Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan pangan, Perum Bulog harus tetap dilibatkan sebagai lembaga pangan nasional yang profesional dan memiliki sistem serta mekanisme yang terintegrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Perjuangan itu menyampaikan, stok beras yang ada saat ini memang tidak banyak. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh Direktur Bisnis BULOG sedang dilakukan penambahan stok yang ada, dan sekarang dalam perjalanan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Bali.

“Dikarenakan kalau menyerap hasil panen beras dari lokal (Bali saja) tidak mungkin terjangkau, karena



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Komplek Pergudangan GBB Sempidi, Badung, Provinsi Bali. Foto: Dep/man

di pasar lebih mahal daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tapi tadi saya lihat ada beras yang sangat bagus dan bervitamin, mudah-mudahan pemasarannya sukses. Berasnya varietas premium yang ditambah vitamin,” jelas Sudin.

Sementara itu, Direktur Bisnis BULOG Febby Novita menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 ini pihaknya tetap menyerap hasil panen dari petani. “Kita tetap menyerap (beras), tapi memang kalau melihat stok harusnya ada *revolving*. Kemarin ada bantuan sosial itu sangat membantu sekali, keluar kemarin 450 ribu ton bantuan sosial itu jadi kita bisa menyerap lagi *revolving* ya,” paparnya.

Febby menyatakan, daya beli

masyarakat di saat pandemi masih turun. Oleh karenanya harus ada bantuan sosial dari pemerintah untuk mengambil stok BULOG. “Jika ada program bantuan sosial ataupun program lainnya yang menggunakan beras BULOG maka bisa kita serap lagi, keluar lagi jadi *fresh* terus berasnya,” imbuhnya.

Menurutnya, stok beras di BULOG untuk Bali saat pandemi Covid-19 masih aman. “Stok beras nasional untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nanti juga aman,” imbuh Febby. Jumlah persediaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kantor Wilayah Bali per 10 Februari 2021 sebanyak 3.416 ton, sementara beras komersial sebanyak 39 ton. Sehingga total persediaan beras BULOG Bali berjumlah 3.455 ton. ■ dep/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau BBKP Surabaya. Foto : Gerald/man

Komisi IV Apresiasi Ekspor Produk Flora dan Fauna Asal Jatim

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan hasil produk-produk flora dan fauna asal Jawa Timur yang berkontribusi terhadap nilai ekspor Indonesia patut diapresiasi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, produk-produk pertanian maupun perkebunan asal Jatim di luar negeri sangat diminati banyak orang. Bahkan potensi flora dan fauna itu juga menjadi juara dan primadona, misalnya sarang burung walet.

“Produk-produk karya pertanian dan perkebunan asal Jawa Timur yang berhasil melakukan ekspor ini memang menarik semua dan patut diapresiasi,” kata Anggia usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, untuk melihat produk hasil dari para eksportir asal Jatim, Selasa (16/2).

Sementara itu, Koordinator Bidang Karantina Hewan BBKP Surabaya Cicik Sri Sukarish mengatakan, per bulannya di sepanjang tahun 2020,

di Jatim, tercatat pihaknya telah memfasilitasi dan mengawal sebanyak 180 eksportir atau selama setahun ada sebanyak 2.160 eksportir.

Ia mengatakan, total ekspor sarang burung walet asal Jatim setiap bulannya berkontribusi sebesar 80 persen dari total ekspor. “Sedangkan untuk perusahaan yang berperan terhadap banyaknya ekspor sarang burung walet asal Jatim itu ada sebanyak 50 perusahaan,” tandas Cicik dalam penjelasannya kepada Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI. ■ opl/sf

Proyek Strategis Nasional Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI meninjau berbagai pembangunan infrastruktur di Sulsel. Foto: Husen/man

Proyek-proyek strategis nasional berupa pembangunan infrastruktur harus mampu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Proyek infrastruktur tak boleh mangkrak bertahun-tahun. Pemerintah pusat harus memperhatikan proyek strategis nasional ini walau di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan ini usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah beserta jajarannya, di Makassar, Senin (15/2). Setidaknya ada beberapa proyek infrastruktur yang ditinjau Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dan dibiayai APBN, seperti perluasan kapasitas Bandara Sultan Hasanuddin, jalan *by pass*, jalan tol, dan pelabuhan.

Kunjungan Komisi V DPR ini sekaligus ingin melihat persoalan yang menghambat pembangunan

infrastruktur di Sulsel. “Proyek strategis nasional harus segera memberi manfaat bagi masyarakat. Ini program yang sudah sekian tahun, namun belum rampung juga, terutama proyek *by pass* Mamminasata dan kereta api,” ungkap Andi Iwan.

Jalan *by pass* yang sedang dibangun ini akan menghubungkan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). Ini akan menciptakan metropolitan baru di Sulsel, selain juga mengurai kemacetan. Namun, masalah klasiknya adalah pembebasan lahan yang belum rampung seluruhnya. Sudah 15 tahun pembebasan lahan belum selesai.

Andi Iwan mengaku kecewa melihat progres pembangunan jalan *by pass* ini, karena sejak kali pertama dimulai pembangunannya masih berkatut pada pembebasan lahan. Politisi Partai Gerindra itu juga menyerukan agar Kementerian Keuangan memberi perhatian penuh atas penyelesaian

proyek yang merupakan jalan nasional ini walau mengalami defisit anggaran akibat pandemi Covid-19.

“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) harus prioritaskan pembayaran pembebasan lahan di tengah defisit anggaran yang luar biasa,” katanya. Sementara itu, mengomentari pembangunan perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, ia mengaku gembira dengan progresnya. Apalagi, *landscape* bandara dibangun sangat indah. Bandara ini diperluas kapasitasnya dari 7 juta penumpang per tahun menjadi 13 juta per tahun.

“Pembangunan bandara cukup memuaskan dengan progres yang ada di tengah pandemi ini. Tidak terlalu jauh deviasinya. Masih positif. Jadi kita tidak ada kekhawatiran dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Sulsel II itu. Ia menambahkan, tahun ini diperkirakan perluasan bandara sudah rampung. ■ mh/sf

Sumsel Layak Miliki Pelabuhan Samudera

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, dengan segala potensi yang dimiliki, Sumatera Selatan seharusnya sudah memiliki pelabuhan samudera sebagai penunjang aktivitas masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan Syarif usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sumsel beserta jajaran yang juga dihadiri oleh para mitra kerja di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumsel, Senin (15/2).

“*Political will*-nya sudah, Presiden sudah datang ke sini dan sudah merestui itu (pembangunan pelabuhan samudera,

red) kemudian administrasinya pun sudah, tinggal implementasinya terhadap pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api. Saya kira memang sudah sangat layak, Sumsel memiliki pelabuhan samudera,” ucap Syarif.

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, saat ini perhatian pemerintah di bidang infrastruktur telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur, baik di pusat maupun di daerah. Meski demikian, Syarif menilai daya saing infrastruktur Indonesia masih banyak yang perlu ditingkatkan

“Inilah saatnya Presiden Jokowi. Karena beliau sangat konsen dalam membangun infrastruktur, apalagi dalam rangka peningkatan ekonomi berkaitan dengan pembangunan

”

INILAH SAATNYA PRESIDEN JOKOWI. KARENA BELIAU SANGAT KONSEN DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, APALAGI DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN INI.

pelabuhan ini. Tentu bagaimana kita perlu mengawasi terlaksananya pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api, karena pelabuhan Boom Baru yang saat ini beroperasi memang sudah tidak layak, karena berada di tengah-tengah kota,” ungkap legislator dapil Kalimantan Barat I itu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, dirinya sendiri pernah menyampaikan perihal pelabuhan Tanjung Api-api kepada Presiden Joko Widodo. Saat itu menurut Herman, Presiden Jokowi cukup terkejut karena pelabuhan yang sejak lama sudah dibuat perencanaannya itu tak kunjung terealisasi.

“Perda RT/RW sudah selesai lima tahun yang lalu, izin pembentukan juga sudah selesai. Tinggal *political will* saja yang belum. Menko Marves, Bappenas, BPN serta kementerian/ lembaga terkait lainnya sudah melakukan rapat agar *ground breaking* dilaksanakan pada akhir tahun 2021,” jelas Herman. ■ es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie. Foto: Eрман/IVI

PJU-TS di Padang Perlu Pemeliharaan Intensif

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Kota Padang berjalan dengan baik, namun membutuhkan pemeliharaan yang intensif. Sebab, menurutnya dengan terintegrasi menggunakan baterai dan sumber matahari ditakutkan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Sehingga perlu *maintenance* yang baik.

Hal tersebut disampaikannya usai

memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur PJU-TS yang telah berhasil dibangun di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (15/2). Mulyadi mengungkapkan betapa pentingnya PJU-TS untuk menerangi masyarakat Kota Padang di malam hari.

“Saya sudah mengingatkan tentang kualifikasi yang harus dipakai PJU-TS dan seterusnya. Karena bukan hanya soal instalasi saja, tetapi juga operasional dan perawatannya. Nah titik-titik strategis apalagi organ-organ vital saya kira PJU-PJU harus lebih

diperbanyak terutama operasional dan *maintenance*. Sebab dapat menunjang aktivitas masyarakat di sini,” terang Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberi anggaran yang cukup besar untuk membantu daerah-daerah yang belum terjangkau listrik PLN, sehingga menurutnya hal ini tidak boleh disia-siakan. Ia berharap Pemerintah Kota Padang dapat menjaga infrastruktur PJU-TS tersebut dengan baik agar masyarakat dapat menikmatinya dalam waktu yang lama.

“Kami mengharapkan semua yang dibangun oleh pemerintah pusat ini bisa berlangsung langgeng, lama. Jadi, terutama daerah-daerah ini yang merupakan daerah strategis yang diberi lampu jalan itu. Daerah tikungan, daerah yang ada basis kerawanan segala macam, agar dapat mengurangi kerawanan-kerawanan yang terjadi di malam hari,” tukas legislator dapil Jawa Barat V itu. ■ er/sf



Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur di Kota Padang, Sumbar. Foto: Erlangga/nvl

Pemetaan Wilayah yang Presisi Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan

Data-data tentang informasi geospasial memiliki peran penting, karena berkaitan dengan *positioning* Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di perlintasan benua dan memiliki posisi yang strategis. Tapal batas seperti batas negara, hingga batas desa perlu dipetakan secara presisi. Kehadiran Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan wilayah hingga struktur topografi dan berbagai potensi, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemanfaatan wilayah.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Deputi Penguatan Inovasi Kemenristek/ BRIN, Kepala BIG beserta jajaran, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor, di Kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/2).

"BIG memetakan sampai tingkat batas-batas (wilayah) dengan struktur topografi, berkaitan dengan potensi-potensi bencana dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentu kita sepakat bagaimana BIG terlebih dengan teknologi hari ini yang dalam konteks pemetaan dengan skala 1:50.000 sudah cukup presisi. Sehingga Insha Allah data-data yang dipetakan (oleh BIG) di seluruh wilayah Indonesia ini, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan tata ruang," jelas Sugeng.



Foto bersama dan pertukaran cenderamata Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dengan Kepala BIG dan Kepala LAPAN. (Foto: Sofyan/sf)

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, kendati Rencana Netral Tata Ruang (RDTR) yang disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD berubah 5 tahun sekali melalui peraturan daerah (perda), data geospasial itulah yang menjadi dasar pemetaan tata ruang. Karena dengan peta serta data-data yang akurat, maka bisa ditentukan secara akurat juga bahwa suatu daerah bisa dikategorikan misalnya untuk wilayah jalur hijau.

"Semua itu diolah salah satunya data dari BIG ini. Setelah data terangkum dengan baik bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), (untuk) menentukan tata ruang dan menstatiskan tanah secara hukum. Misalnya memetakan daerah hutan yang memang di luar tanah hutan, misal dibuat usaha perkebunan, maka

bentuknya HGU (Hak Guna Usaha). Sebaliknya dengan data yang valid dari BIG, maka BPN juga bisa menentukan daerah tersebut (dibuat status, HGB (Hak Guna Bangunan), tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Sebelumnya, Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam paparannya menyampaikan program kerja BIG, berkomitmen ketersediaan informasi geospasial yang lengkap dan akurat. Hal ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Pihaknya juga melakukan koordinasi dan integrasi serta mewujudkan infrastruktur geospasial nasional yang berkualitas, yang di dalamnya menyangkut aspek kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi. ■sf

Pembangkit Kekurangan Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik

Komisi VII DPR RI mengkritisi kondisi yang terjadi di sejumlah pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalami kekurangan stok batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian bahkan menilai kekurangan stok batu bara tidak hanya terjadi di PLTU Suralaya PT Indonesia Power di Cilegon, Provinsi Banten saja, namun juga sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Komisi VII DPR RI meminta kepada PLN untuk menjamin tak ada pemadaman listrik, kendati ada keterlambatan suplai batu bara.

Ramson mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, Kamis (11/2). Kunjungan ini untuk memastikan terjaminnya penyediaan dan pasokan energi listrik bagi masyarakat. Ramson menambahkan, ancaman keterlambatan ketersediaan energi primer batu bara ini sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Keterjaminan batu bara yang 56 persen sebagai energi primer untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman. Karena kalau suplai energi primer batu bara itu macet ini, menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum. PLN diamanatkan untuk menyediakan energi listrik bagi masyarakat umum, jadi ini harus *di-back up* oleh DPR RI dan Kementerian ESDM yang di sektor kebijakannya. Kita akan mengundang Menteri ESDM dan jajarannya membahas masalah



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meninjau PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Foto: Andri/Man.

keamanan energi primer batu bara untuk PLTU-PLTU yang dikelola PLN,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Ramson menambahkan, pihaknya juga meminta komitmen vendor-vendor batu bara untuk menjaga ketersediaan energi primer batu bara yang digunakan PLN. Di sisi lain, Ramson menilai manajemen PLN kurang antisipatif dan proaktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan, baru-baru ini. Kekurangan stok batu bara yang dialami PLN dinilai lebih kepada permasalahan teknis.

“Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar daripada *average stock* memang dampaknya *cost* sedikit lebih besar, tetapi terjadi ketersediaan

batu baranya ini yang kurang (diantisipasi) dari direksi PLN,” ungkap Ramson lebih lanjut.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menilai kelangkaan batu bara ini terkait persoalan nasionalisme. “Mau harga batu bara di luar (negeri) setinggi apapun, dia (vendor batu bara) harus penuhi dulu kebutuhan yang ada di dalam negeri. Kalau mau ekspor memanfaatkan nilai harga batu bara tersebut, ya produksinya harus ditambah, bukan memindahkan apa yang harus dikirimkan ke Suralaya malah dikirimkan ke negara lain. Yang jelas kepentingan bangsa harus lebih dulu dari pada kepentingan perusahaan,” kritik politisi PDI-Perjuangan itu. ■ man/sf

Komisi VII Dorong Produksi Blok Migas Sijunjung Segera Berjalan

Provinsi Sumatera Barat menyimpan potensi sumber daya alam energi yang besar. Setidaknya Sumbar memiliki tiga blok cadangan migas dan batu bara yang berpotensi untuk dilakukan eksplorasi, yakni pada wilayah lepas pantai Mentawai, Blok GNE Sijunjung, dan wilayah Sumur Sinamar Blok Singkarak South West Bukit Barisan, di Kabupaten Sijunjung, Sumbar.

Guna memperoleh informasi terkait kinerja Blok South West Bukit Barisan, Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke blok migas yang sudah dieksplorasi oleh PT Rizki Bukit Barisan (PT RBB) itu, di Sijunjung, Sumbar, Kamis (11/2). Blok ini diketahui memiliki potensi gas sebesar 35 mmscfd atau setara 210 Mega Watt (MW) listrik.

“Kami (Komisi VII, **red**) sudah melihat betapa besar potensi migas yang ada di sini. Cadangannya besar dan sudah dilakukan eksplorasi. Sudah ada cadangan yang tersedia, sehingga memang masalahnya sekarang bagaimana kita bisa mengeksploitasinya melakukan monetized pada cadangan gas bumi ini. Sudah ada kondensat juga di sini, sehingga sangat berpotensi menjadi sumber untuk pembangkit listrik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno usai pertemuan dengan Bupati Sijunjung dan mitra kerja.

Meski masih dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam tahap negosiasi dengan *potential buyer*, Komisi VII DPR RI optimis hal tersebut dapat diatasi dengan



Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke blok migas yang sudah dieksplorasi oleh PT Rizki Bukit Barisan (PT RBB) itu, di Sijunjung, Sumbar, Kamis (11/2/2021). Foto : Alfi/Man

melibatkan seluruh *stakeholder* terkait agar potensi-potensi energi tersebut dapat terealisasi. Tantangan lainnya yakni, semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan, namun ketersediaannya semakin menipis. Untuk itu, Blok Migas Sijunjung direncanakan akan mulai berproduksi pada 2023 mendatang, meski meleset dari target pada 2020 lalu.

“Koordinasi dengan seluruh *stakeholder* diperlukan secepatnya agar potensi-potensi yang ada dapat segera terealisasi. Jangan sampai nanti investasi yang telah dilakukan dan sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung itu tidak bisa termaksimalisasi dan teroptimalisasi. Komisi VII mendorong mitra-mitra kami dalam hal ini PLN, PGN bahkan Pertamina juga ya untuk bisa mengevaluasi hal itu.” sambung Eddy.

Potensi gas bumi sebagai *clean*

energy dan sebagai energi transisi dari *fossil energy* menuju energi baru terbarukan (EBT) dinilai sangat penting. Untuk itu, Eddy menilai pengembangannya perlu tindak lanjut lebih jauh. Jika masih ada kendala terkait potensial *buyers* dan infrastruktur, *stakeholder* harus mampu berpikir *out of the box*. Segala proses negosiasi harus dipercepat sehingga potensi migas dapat segera bisa dimanfaatkan.

“Pada akhirnya kami juga berbicara tentang *demand* yang ada untuk pembangkit listrik, ini tujuannya adalah kegiatan ekonomi dan komersialisasi. Di Komisi VII, tugas kami untuk bisa mendorong para *stakeholder* yang ada untuk bisa menciptakan *demand* itu. Tujuannya agar energi bersih yang ada di Kabupaten Sijunjung ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten ini,” tutup politisi Fraksi PAN itu. ■ alw/sf

Komisi IX Dukung Program Pemprov Kepri Bangun SDM Berkualitas

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendukung program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di bidang ketenagakerjaan melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Agar akselerasi pembangunan SDM meningkat, dibutuhkan pembenahan terhadap seluruh aspek serta perencanaan kerja yang lengkap dan matang, serta didukung penganggaran dan penyerapan yang baik.

“Menurut saya, upaya ini mesti dilakukan dengan memberikan pelatihan vokasional serta penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi ujung tombak dalam menghasilkan SDM yang kompeten serta dalam upaya mencetak wirausaha baru. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut terus berbenah dan tanggap terhadap kebutuhan daerah Kepulauan Riau,” ujar Felly saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan sejumlah *stakeholder* di Kantor Gubernur Kepri, Kota Batam, Senin (15/2).

Legislator dapil Sulawesi Utara ini menuturkan, dalam bidang ketenagakerjaan, Kepri mencatat tren peningkatan potensi tenaga kerja serta penyerapan angkatan kerja. Ketersediaan suplai tenaga kerja ini menjadi nilai tambah bagi Pemprov Kepri dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Oleh sebab itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan kelebihan angkatan kerja yang diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM sejalan dengan program



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau. Foto: Jaka/nvl

prioritas pemerintah pusat. Pada kesempatan ini kami sampaikan, Komisi IX DPR RI sangat mendukung program pembangunan di bidang ketenagakerjaan melalui pembangunan SDM yang berkualitas, yang merupakan kerja besar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah,” imbuh kata politisi F-NasDem tersebut.

Selain itu, lanjut Felly, pada masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya berharap besar agar pemerintah daerah dapat terus mendorong dioperasikannya perusahaan-perusahaan terutama untuk sektor produktif, yang memiliki

kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang disiplin dan ketat.

“Tak lupa kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kepulauan Riau yang telah berhasil membangun dunia ketenagakerjaan yaitu sebagai Provinsi Peraih Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 terbaik berdasarkan indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja yang sebelumnya dipegang oleh Provinsi Jawa Barat,” tutupnya. ■ jk/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena usai pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Sekda DIY, perwakilan Kemenkes, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, BPOM, BKKBN, dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Foto: Arief/nvl

Komisi IX Pantau Penanganan Covid-19 di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI memastikan proses vaksinasi dan pelaksanaan penyaluran insentif tenaga kesehatan yang sudah diperjuangkan Komisi IX DPR RI, serta bagaimana pembayaran klaim rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pihaknya juga ingin memantau penanganan pandemi Covid-19 oleh para mitra kerjanya.

“Komisi IX ingin melihat dari dekat bagaimana upaya mitra kerja Komisi IX benar-benar bekerja dengan baik dalam pelayanan dan penanganan Covid-19,” kata Melki, sapaan akrabnya, usai pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah DIY, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, BPOM, BKKBN, dan BPJS Kesehatan

dan Ketenagakerjaan, di Gedung Kepatihan, Senin (15/2).

Melki menjelaskan, menurut keterangan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, sesuai aturan pusat, DIY turut mewajibkan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin, namun tidak mengedepankan sanksi bagi yang menolak. “Kami mendorong pemerintah agar tidak melakukan pemberian sanksi kepada masyarakat. Yang harus diutamakan adalah edukasi bagi publik. Apabila edukasi tidak diikuti, baru kemudian bisa diberikan sanksi,” tandas politisi Partai Golkar itu.

Sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2016, Melki menerangkan, pelaksanaan optimalisasi produksi dan penggunaan obat dan alat kesehatan yaitu GeNose yang diproduksi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah

”

KAMI MENDORONG PEMERINTAH AGAR TIDAK MELAKUKAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA MASYARAKAT. YANG HARUS DIUTAMAKAN ADALAH EDUKASI BAGI PUBLIK.

yang harus dioptimalisasi. “Kami mengunjungi UGM untuk memastikan bahwa GeNose dapat menjadi alat *testing* dan *screening* yang baik serta mendorong Kemenkes dalam memperjuangkan di WHO untuk memberikan sertifikasi agar dapat dipasarkan secara internasional,” kata legislator dapil NTT II itu. ■ afr/sf

Komisi IX Sesalkan Klaim RS yang Belum Dibayarkan



Foto bersama dan pertukaran cenderamata antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan manajemen Rumah Sakit Zainoel Abidin, Aceh. Foto: Ayu/nvl

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyesalkan masih adanya klaim rumah sakit yang belum diselesaikan. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh juga masih ada yang belum dibayarkan.

“Kami baru tahu ternyata klaim Rumah Sakit Zainoel Abidin kepada negara, dalam hal ini Kementerian Kesehatan baru dibayar sampai dengan bulan Agustus 2020 lalu. Selebihnya dari bulan September sampai hari ini (Februari 2021) belum dibayar. Jadi totalnya kurang lebih Rp14 miliar. Ini tentu sangat disesalkan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Zainoel Abidin, Aceh, Senin (15/2).

Dilanjutkan Ninik, sapaan akrab

”

KAMI JUGA BARU TAHU BAHWA UNTUK INPUT DATA INSENTIF DIBATASI HINGGA TANGGAL 15 JANUARI. PERTANYAANNYA, KALAU MELEBIH TANGGAL TERSEBUT APA ARTINYA NAKES TIDAK MENDAPAT INSENTIF YANG SUDAH MENJADI HAKNYA.

Nihayatul Wafiroh, RS membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RS tidak akan bisa memberikan

pelayanan maksimal, jika mereka kesulitan membayar gaji karyawan, juga kesulitan dalam memenuhi obat-obatan serta sarana penunjang lainnya.

Tidak hanya itu, Ninik juga mengungkapkan bahwa insentif nakes baik di Aceh dan di beberapa daerah lainnya masih ada yang belum dibayarkan. Salah satu alasan penyebab belum dibayarkan insentif tersebut karena telah melewati batas input data yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Padahal insentif tersebut merupakan hak para nakes yang berada di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami juga baru tahu bahwa untuk input data insentif dibatasi hingga tanggal 15 Januari. Pertanyaannya, kalau melebihi tanggal tersebut apa artinya nakes tidak mendapat insentif yang sudah menjadi haknya. Lalu anggaran tersebut dikemana? Menurut saya ini bisa menjadi kezaliman negara terhadap para nakes. Dan tentu harus segera dihentikan kezaliman ini,” tegas Ninik.

Terkait kedua permasalahan ini, politisi Fraksi PKB itu akan segera mempertanyakan, sekaligus mendesak Menteri Kesehatan dan *stakeholder* untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan melunasi klaim RS serta membayarkan insentif bagi nakes.

Kunker Komisi IX DPR RI ke Aceh juga diikuti Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar (F-PKS), Anggota Komisi IX Elva Hartati dan Edy Wuryanto dari F-PDI Perjuangan, Wenny Haryanto (F-Golkar), Sri Meliyana (F-Gerindra), Nur Nadlifah (F-PKB), Hasan Saleh (F-Demokrat) serta Netty Prasetyani (F-PKS). ■ [ayu/es/sf](#)

Pendidikan Harus Jadi Prioritas dalam Penanganan Pandemi



Foto bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemprov Sumsel. Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan, sektor pendidikan harus diberikan perhatian khusus dalam penanganan bencana seperti pandemi yang saat ini sedang melanda. Pendidikan harus mendapat penanganan serius seperti halnya sektor kesehatan dan pangan.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan dalam sambutannya pada momen diskusi Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Bupati Sumatera Selatan Herman Deru beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (15/2). Menurut Agustina, jika ada revisi dalam Undang-Undang Kebencanaan, maka hendaknya pendidikan harus menjadi prioritas, setelah urusan kesehatan dan pangan.

“Sekarang kita sadar betul bahwa bencana itu bisa datang dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Bencana itu bukan hal yang insidental saja, pada periode ini kita mengalami pandemi Covid-19 dalam jangka waktu yang tidak sebentar, tidak tahu pasti kapan akan berakhir. Dan kalau sudah satu tahun maka pendidikan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pendidikan juga harus mendapatkan prioritas penanganan,” papar Agustina.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan keluhan para anak didik yang merindukan proses belajar tatap muka. Namun karena kekhawatiran penyebaran virus Covid-19, maka proses pembelajaran dilakukan secara virtual, khususnya di daerah-daerah yang penyebarannya masih tinggi.

Merespons hal tersebut, Agustina mendorong pemerintah agar memberikan jaminan aman bagi para siswa dan guru serta tenaga yang bergelut di bidang pendidikan, sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik. Dia juga mengungkapkan, Komisi X DPR RI telah membahas masalah tersebut dalam Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan agar pendidikan juga menjadi perhatian utama di masa-masa pandemi.

“Karena itu dalam Panja Peta Jalan Pendidikan, kami mengusulkan jika ada revisi Undang-Undang tentang Kebencanaan, kami meminta supaya pendidikan, masuk di dalam sektor yang menjadi prioritas, bersama-sama dengan kesehatan dan urusan pangan,” dorong politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini sembari menutup pernyataan. ■ eko/es

Komisi X Dukung Mata Pelajaran Pancasila dalam Kurikulum

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan Komisi X DPR RI

mendukung secara penuh mata pelajaran Pancasila untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengingat, peta jalan pendidikan nasional tidak hanya terdapat pada tingkatan visi pemerintah, tetapi juga harus diletakkan sebagai visi negara.

Pemaparan tersebut disampaikan Fikri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, KNPI dan SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar, di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (15/2).

“Organisasi kepemudaan diwakili SAPMA dan KNPI mengusulkan agar Pendidikan Pancasila dihidupkan lagi untuk masuk di kurikulum. Jika, sistem P4 di masa lalu sudah tidak relevan maka pemerintah harus memodifikasi dengan sistem kekinian. Tujuannya, supaya semua pihak dapat terakomodasi. Sebab, Pancasila milik kita semua,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Sebelumnya, pada audiensi tersebut, organisasi kepemudaan yang diwakili Sekretaris Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar Adrian menyampaikan sejumlah usulan mengenai konsep peta jalan pendidikan. Ia mengusulkan, pentingnya agar segera adanya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan

nasional berdasarkan Pancasila. Maka, kami mengusulkan untuk dihidupkan lagi mata pelajaran Pancasila untuk masuk di tiap sekolah. Terlebih, sepanjang pandemi, siswa-siswi saat ini masih melaksanakan pendidikan secara daring sehingga perlu peningkatan kualitas akademis dan pendidikan karakter Pancasila,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam rapat Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, baru-baru ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

“Penggalian terhadap seluruh khazanah

dan tradisi kebudayaan Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan kader-kader dan pelajar Pancasila dalam rangka untuk pendidikan karakter pada masa-masa akan datang,” tegas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespon.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Nur Purnamasidi (F-Golkar), Andy Muawiyah Ramly (F-PKB), Sakinah Aljufri (F-PKS). Hadir mendampingi, Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh. Serta, Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Jumeri, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bakrun dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Yaswardi. ■ pun/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Puntho/nvl



Komisi X Apresiasi Rencana Pembangunan *Sport Center* di Deli Serdang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Foto: Ria/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi rencana pembangunan *sport center* di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Sumut dan Aceh.

"Kami sangat bangga dengan inisiatif daerah dalam pembangunan *sport center* yang nantinya akan menjadi *icon* bagi Deli Serdang," katanya usai memimpin pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi beserta jajaran yang juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan

Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Medan, Sumut, Senin (15/2).

Hetifah berharap, pembangunan *sport center* bisa diintegrasikan menjadi *sport science*, *sport tourism* dan *sport industry* dengan mensinergikan program yang terukur, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kesempatan ini juga Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan mengatakan untuk menyongsong penyelenggaraan PON ke XXI di Sumatera Utara dan Aceh, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan pembenahan terhadap sarana dan prasarana olahraga.

"Kami memiliki harapan besar terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga yang masih terus dipetakan

dan diintegrasikan menjadi *sport science*, *sport tourism* dan *sport industry* melalui sinergi program yang terukur, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Sementara, di bidang pariwisata, pihaknya terus berupaya mengelola, mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata Deli Serdang sebagai daerah tujuan wisata. "Saat ini, kami tengah membangun dan mengembangkan media dan tempat promosi produk unggulan daerah (P3UD), yang tujuannya, untuk memfasilitasi para pelaku usaha di dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk," terang Ashari dalam paparannya kepada Tim Kunker Komisi X DPR RI. ■ rmm/es

Insentif Pajak Dinilai Belum Mampu Gerakkan Dunia Usaha

Kementerian Keuangan memberikan insentif dan fasilitas pajak pada tahun 2020 melalui PMK Nomor 86 Tahun 2020 dan PMK Nomor 28 Tahun 2029 sebagai respon atas pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Insentif perpajakan ini pun diperpanjang di tahun 2021 oleh pemerintah melalui PMK Nomor 9 Tahun 2021. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. melihat implementasi pemberian insentif perpajakan di Jawa Timur tidak berdampak maksimal bagi pelaku usaha, sebab pandemi Covid-19 menghantam dunia usaha terlalu dalam, sehingga insentif pajak yang diberikan tetap tidak mampu menggerakkan usaha.

“Kalau kita lihat dari yang dialokasikan pemerintah untuk mengalokasikan pajak itu Rp120 triliun. Nah ternyata yang mengambil insentif pajak ini tidak lebih dari Rp20 triliun dan kita lihat (untuk) Jawa Timur juga porsinya kecil. Jadi memang pandemi Covid-19 ini dampaknya begitu dalam, sehingga bagi dunia usaha pun diberikan insentif pajak tidak dapat menjalankan usahanya,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jatim di Surabaya, Senin (15/2).

Dolfie menjelaskan, selama pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya memberikan berbagai stimulus bagi pelaku usaha agar dunia usaha tetap berjalan. Namun, perekonomian Indonesia masih membutuhkan masyarakat berkumpul. Sehingga aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditujukan untuk menurunkan angka

kasus Covid-19 memiliki konsekuensi menekan konsumsi masyarakat yang berdampak pada perlambatan ekonomi.

“Jadi kalau dari sisi pemerintah *kan* sebenarnya kebijakan itu dari segala arah. Dari sisi *demand* juga diberikan, dan dari sisi *supply* juga diberikan. Kemudian dari sisi restrukturisasi kredit juga diberikan. Bantuan modal kerja juga diberikan. Cuma memang situasinya yang tidak memungkinkan. Karena ekonomi kita masih membutuhkan orang berkumpul,” terang legislator dapil Jawa Tengah IV ini.

Meskipun kondisi perekonomian masih berkontraksi akibat pandemi, namun Dolfie menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah membaik. Hal ini ditandai dengan kuartal ke-4 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di minus 2,19 persen. Sementara sebelumnya berada di minus 5,32 persen pada kuartal ke-2, serta minus 3,49 persen pada kuartal ke-3. Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pun hanya kalah dari Cina jika dibandingkan

dengan negara G-20 dan hanya kalah dari Vietnam jika dibandingkan dengan negara di ASEAN.

“Nyatanya sampai dengan kuartal ke-4 akhir 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi kita sudah membaik dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara G20 kita hanya kalah dengan China, kalau kita bandingkan dengan ASEAN, kita hanya kalah dengan Vietnam. Jadi artinya trennya sudah pada arah yang benar, stimulus fiskal, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem keuangan itu sudah pada arah yang baik” jelas Dolfie. ■ [nap/sf](#)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Dolfie O.F.P. Foto : Tasya/nvl

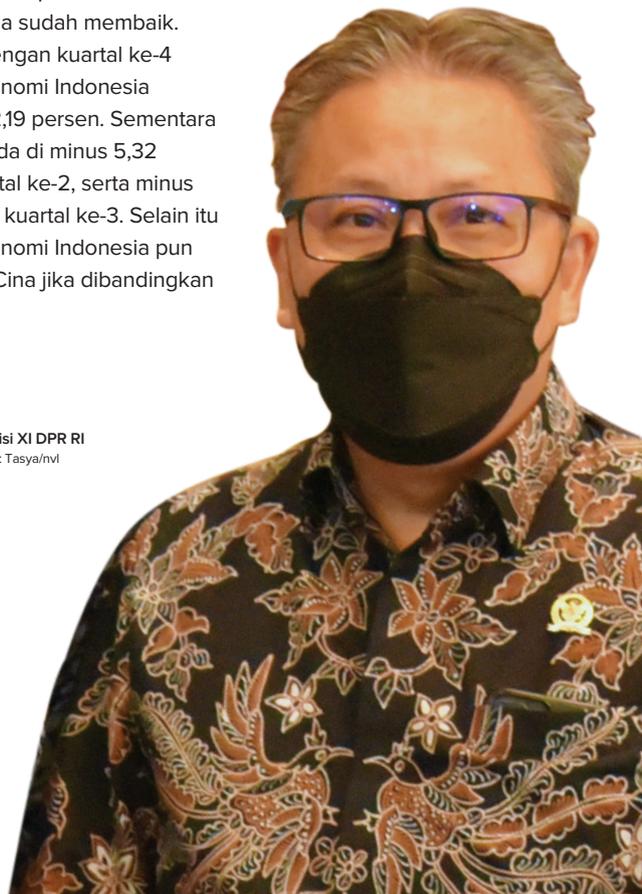




Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI Pemrov Sumsel Herman Deru, perwakilan Kemenkeu, BI, OJK serta mitra kerja terkait di Palembang, Sumsel. Foto: Fitri/man

Komisi XI Dukung Pemulihan Ekonomi Sumsel

Anggota Komisi XI DPR RI Percha Leanpuri mengapresiasi dukungan pemerintah terkait upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Percha melihat dukungan yang diberikan pemerintah sudah maksimal. Tak hanya dukungan yang ditempatkan di perbankan dan Himbara, namun dukungan itu juga diberikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Alhamdulillah semua yang tujuannya untuk pemulihan ekonomi di masyarakat itu sudah berjalan, bahkan serapan dari kredit itu juga sudah sangat maksimal, pendapatan pajak juga sudah

maksimal,” ujarnya usai pertemuan dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta mitra kerja terkait di Palembang, Sumsel, Senin (15/2).

Percha tidak memungkiri meski perekonomian Sumsel mengalami kontraksi akibat krisis yang ditimbulkan Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Sumsel masih tinggi dan terus mengalami perbaikan. Bahkan di kondisi terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumsel sudah dalam posisi minus 0,11 dari sebelumnya minus 1,4 persen.

Politisi Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menekankan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus memberikan

dukungan bagi upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumsel. Dalam hal ini, masih kata Percha, Komisi XI DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi.

“Dukungan Komisi XI sangat banyak ya, terutama mengenai anggaran, belum lagi tentang SNI, untuk pinjaman daerah, itu kita dorong terus. Karena itu tadi disampaikan pak Gubernur agar dapat terealisasi pencairannya sesegera mungkin,” harap legislator daerah pemilihan Sumsel II itu sembari menutup pernyataannya. ■ *snw/sf*

Komisi XI Optimis Perekonomian Jabar Meningkatkan di 2021



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memimpin Kunler Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jabar. Foto: Taufan/rw/

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perbaikan sebesar 0,22 persen atau minus 2,39 persen (year of year) pada triwulan IV tahun 2020. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jabar tahun 2020 menjadi minus 2,44 (yoy), menurun dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2021, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto optimis perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan dan akan didorong melalui keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah.



PADA TAHUN 2021 SAYA OPTIMIS DEMAND KREDIT DI JABAR SECARA GRADUAL BERPOTENSI MENINGKAT YANG DIDUKUNG OLEH MEMBAIKNYA BUSINESS CONFIDENCE, PERBAIKAN REGULASI, SERTA RELOKASI SEJUMLAH PERUSAHAAN

“Dari sisi stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, hal ini ditunjukkan dari permodalan yang tinggi dan likuiditas *ample*, pertumbuhan kredit baru pada bulan Desember 2020 tercatat 29,94 persen secara *year on year*, aliran dana masuk sebesar Rp35,4 triliun (11 Februari 2020), jumlah emiten baru tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 53 emiten, dan jumlah investor pasar modal di Januari 2021 sebesar 4,15 juta,” pungkask Dito saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (15/2).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, di awal 2021 jumlah investor pasar modal mencapai 4,15 juta investor dengan didominasi investor ritel 99,6 persen. Jumlah SID/Investor di Jabar mencapai 735.000 orang atau 19,3 persen secara nasional. Jumlah ini terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.

“Pada tahun 2021 saya optimis *demand* kredit di Jabar secara gradual berpotensi meningkat yang didukung oleh membaiknya *business confidence*, perbaikan regulasi, serta relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia yang sebagian besar memilih lokasi di Jabar, longgarnya likuiditas akan menjadi modal yang penting untuk optimalisasi penyaluran kredit *prudent* di 2021,” paparnya.

Lebih lanjut Dito menyampaikan, dalam rangka menggerakkan industri otomotif dan meningkatkan investasi pada sektor tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi PPhBM yang bertujuan untuk meningkatkan *purchasing power* dari masyarakat dan memberikan *jumpstart* pada perekonomian.

“Saya mengapresiasi gerak cepat dan dukungan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, terkait aturan uang muka atau *down payment* (DP) 0 persen, kemudian kebijakan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) Kredit untuk kendaraan bermotor juga perlu disesuaikan tentunya dukungan kebijakan ini akan mampu mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor,” imbuh legislator Jateng VIII itu. ■ tn/sf

Perawatan Alutsista Harus Ditangani Dengan Baik



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno (kiri) usai memimpin Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI meninjau alutsisa Skadron-11/Serbu Puspenerbad. Foto: Chasbi/nvl

Helikopter Apache Blok III (AH-64E Guardian) yang dimiliki Skadron-11/Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) memiliki kemampuan tempur lebih baik dari tipe sebelumnya, dengan tenaga mesin dan *payload* yang lebih besar, serta kemampuanintai dan tempur yang meningkat. Komisi I DPR RI berharap pemeliharaan dan perawatan alutsista yang menggunakan anggaran negara harus ditangani dengan baik.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno mengatakan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR dengan Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso di Skadron-11/Serbu Puspenerbad, di Semarang, Jawa

Tengah, Senin (15/2).

“Di Semarang ini ada dua Skadron, yaitu Skadron-11/Serbu yang secara umum alutsistanya berasal dari Amerika Serikat, sedang Skadron-13/Serbu yang alutsistanya berasal dari Rusia. Nah, yang kita kunjungi di Skadron-11/Serbu ini kita punya Apache versi terakhir, maka perawatannya harus baik, dan saya dengar perawatannya itu 100 persen dari Apache itu sendiri,” kata legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Anton menjelaskan bahwa terkait dengan alokasi anggaran alutsista, Komisi I DPR RI sudah meningkatkan anggaran Penerbad menjadi Rp1,6 triliun yang semula tersedia 128 pesawat dan hanya 24 pesawat yang *available*, maka dengan didukung peningkatan anggaran tersebut, semua pesawat akan layak terbang.

“Kejadian helikopter jatuh pada tahun lalu menjadikan peringatan, sehingga perawatannya harus sesuai dengan waktunya untuk dirawat dan juga anggarannya yang tadinya 30 persen, sekarang menjadi 90 persen. Intinya, ke depannya nyawa itu bukan harga yang murah, itu adalah harga wajib, karena tidak boleh ada satupun nyawa yang hilang akibat penerbangan,” tegas Anton.

Sementara itu, Danpuspenerbad Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso kepada Komisi I DPR RI mengatakan bahwa pemeliharaan alutsista seperti helikopter perlu ditangani dengan baik, karena jika helikopter itu sampai mogok saat terbang, itu berkaitan dengan faktor keselamatan pilot dan krunya. Dirinya berkomitmen siap dicopot dari jabatannya jika perawatan alutsista tidak sesuai dengan standar pabrik. ■ cas/sf



Foto bersama BKSAP DPR RI dalam kegiatan BKSAP Day bertema 'Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia' di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/2/2021). Tim BKSAP dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Hira/Man



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin rapat secara fisik dan virtual guna menetapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari PDI-Perjuangan, Anggota DPR RI Charles Honoris di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/mr



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (dua dari kanan) saat mendampingi penerimaan piagam penghargaan berupa predikat ZI dan WBK untuk Biro KSAP dan Pusdiklat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2021). Foto: Prima/nvl

